



### DESA ANTIKORUPSI BERBASIS MASJID: PENINGKATAN KOMPETENSI DAI ANTIKORUPSI DEWAN MASJID INDONESIA RANTING PANGGUNGHARJO SEWON BANTUL

*Mosque-Based Anti-Corruption Village: Improving The Competency of Anti-Corruption Preachers of The Indonesian Mosque Council, Panggungharjo, Sewon, Bantul Branch*

**Suyadi<sup>1</sup>, Suyitno<sup>2</sup>, Fandi Akhmad<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, <sup>2</sup>Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Ahmad Dahlan, <sup>3</sup>Pendidikan Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan

*Kampus IV (Utama) di Jalan Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul, 55191*

\*Alamat korespondensi: [suyadi@mpai.uad.ac.id](mailto:suyadi@mpai.uad.ac.id)

*(Tanggal Submission: 13 Setember 2025, Tanggal Accepted : 25 Oktober 2025)*



#### Kata Kunci :

Kelurahan  
Panggungharjo,  
desa antikorupsi,  
dewan masjid  
Indonesia,  
Pemberdayaan  
Masyarakat

#### Abstrak :

Kasus korupsi dana desa terus meningkat, dari 17 kasus pada tahun 2016 menjadi 155 kasus dengan pada tahun 2022. Sebagai solusinya, KPK membentuk desa antikorupsi yang hingga saat ini jumlahnya mencapai 40 desa tersebar di seluruh Indonesia. Kelurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul merupakan desa binaan Universitas Ahmad Dahlan yang menjadi desa antikorupsi pertama diluncurkan KPK secara langsung pada tahun 1 Desember 2021. salah satu unsur penting dalam pembentukan desa antikorupsi adalah keberadaan tokoh adat dan atau tokoh agama, termasuk Dewan Masjid Indonesia (DMI). Namun, selama ini tokoh agama yang terhimpun dalam DMI khususnya ranting Panggungharjo belum berkontribusi dalam pengembangan desa antikorupsi panggungharjo. Oleh karena itu, Tim pengabdian hadir memberi solusi berupa pelatihan dai antikorupsi. Metode pelaksanaan menggunakan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, evaluasi program dan keberlanjutan. pelaksanaan program dilakukan sepanjang bulan Juli sampai dengan September dengan durasi 4 kali pertemuan. Peserta program PkM ini adalah 35 orang anggota dan pengurus DMI ranting Panggungharjo, berasal dari ketua takmir masjid se kalurahan panggungharjo. Hasil PkM menunjukkan bahwa pelatihan dai antikorupsi menjadi salah satu inovasi kalurahan Panggungharjo sebagai desa antikorupsi pertama di Indonesia. Para peserta mengalami peningkatan baik dari sisi pengetahuan tentang fikih antikorupsi, sikap integritas, dan keterampilan dakwah antikorupsi. Program ini akan dilanjutkan secara kontinu dengan dakwah

	antikorupsi minimal satu kali dalam satu bulan di seluruh masjid lingkungan Panggungharjo.
<b>Key word :</b>	<b>Abstract :</b>
<i>Panggungharjo Village, anti-corruption village, Indonesian Mosque Council, Community Empowerment</i>	Village fund corruption cases continue to rise, from 17 cases in 2016 to 155 cases in 2022. As a solution, the Corruption Eradication Commission (KPK) established anti-corruption villages, which currently number 40 across Indonesia. Panggungharjo Village, Sewon District, Bantul Regency, is a fostered village under Ahmad Dahlan University and was the first anti-corruption village launched by the KPK on December 1, 2021. One important element in establishing an anti-corruption village is the presence of traditional and/or religious leaders, including the Indonesian Mosque Council (DMI). However, religious leaders within DMI, particularly the Panggungharjo branch, have not contributed to the development of the Panggungharjo anti-corruption village. Therefore, the Community Service Team (Pengabdian) is here to provide a solution in the form of anti-corruption preacher training. The implementation method uses outreach, training, mentoring, program evaluation, and sustainability. The program was implemented from July to September with four meetings. Participants in the Community Service Program (PKM) were 35 members and administrators of the Panggungharjo branch of the Indonesian Muslim Student Association (DMI), representing mosque administrators from throughout the Panggungharjo village. The PKM results demonstrated that the anti-corruption da'i training was an innovation for Panggungharjo village, becoming the first anti-corruption village in Indonesia. Participants experienced improvements in their knowledge of anti-corruption fiqh (Islamic jurisprudence), integrity, and anti-corruption da'wah skills. This program will continue with anti-corruption da'wah sessions at least once a month in all mosques in the Panggungharjo area.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7<sup>th</sup> edition) :

Suyadi., Suyitno., & Akhmad, F. (2025). Desa Antikorupsi Berbasis Masjid: Peningkatan Kompetensi Dai Antikorupsi Dewan Masjid Indonesia Ranting Panggungharjo Sewon Bantul. *Jurnal Abdi Insani*, 12(10), 5486-5497. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i10.3047>

## PENDAHULUAN

Desa Panggungharjo merupakan desa binaan Universitas Ahmad Dahlan sejak 2018 yang kini telah menjadi desa antikorupsi pertama di Indonesia, diresmikan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) pada 1 Desember 2021 (Edi, 2021). Jarak antara UAD dengan desa Panggungharjo adalah 6 Km dengan jarak tempuh 17 menit. Secara administrasi, desa Panggungharjo memiliki 14 padukuhan yang terbagi menjadi 118 RT dengan luas wilayah 560.966,5 Ha. Secara geografis, desa Panggungharjo merupakan salah satu desa di Kabupaten bantul yang secara langsung berbatasan dengan kota Yogyakarta atau ibu kota D.I. Yogyakarta (Panggungharjo, 2019). Gambar 1 merupakan cover buku panduan desa antikorupsi dan launching desa antikorupsi panggungharjo.



Gambar 1. Buku panduan desa antikorupsi KPK dan Launching desa antikorupsi Panggungharjo

Secara historis, desa Panggungharjo merupakan gabungan dari tiga kelurahan, yakni: Cabeyan, Prancak dan Krapyak. Istilah Panggungharjo itu sendiri diambil dari “Panggung Krapyak” atau oleh penduduk sekitar disebut “Kandang Menjangan.” Sebagaimana termaktub dalam sejarah, bahwa Panggung Krapyak itu sendiri merupakan salah satu bagian dari “sumbu imajiner” Keraton Yogyakarta yaitu garis Gunung Merapi – Tugu Pal Putih – Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat – Panggung Krapyak dan Parangkusumo di pantai selatan. Secara yuridis, desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat nomor 7, 14, 15, 16, 17, dan 18 Monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang desa di kala itu. Dari maklumat tersebut, kemudian ditetapkan hari jadi Desa Panggungharjo jatuh pada 24 Desember tahun 1946 (Panggungharjo, 2019).

Mitra kelompok sasaran dalam PKM ini adalah Dewan Masjid Indonesia Wilayah D.I. Yogyakarta, khususnya Ranting Panggungharjo (DMI Ranting Panggungharjo). Secara organisatoris, DMI Ranting Panggungharjo telah masuk dalam struktur lembaga pemerintahan desa sebagai unsur pembinaan keagamaan. Struktur tertinggi (dewan pakar) adalah Lurah Panggungharjo, pengurus harian khususnya ketua dan di dalamnya memilii 4 departemen, yakni: a) departemen pemberdayaan dan pengembangan SDM; b) departemen dakwah dan pengkajian; c) departemen sarana, hukum dan wakaf; d) potensi muslimah dan anak (Ismanto, 2021).

Dalam konteks desa antikorupsi, DMI Panggungharjo menempati posisi strategi sebagai pilar kearifan lokal. Dalam instrumen Pedoman Desa Antikoruspsi yang diterbitkan KPK, khususnya butir 5 (indikator 17 dan 18), yakni kearifan lokal, pilar ini berisi tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan lain-lain yang berperan aktif dalam kampanye pencegahan korupsi (4). Bahkan bobot penilaian pada pilar ini mencapai 15/100 (Korupsi, 2021; Suyadi, 2020a; Suyadi et al., 2021).

Potensi DMI Ranting Panggungharjo dengan 4 departemen di dalamnya menempati posisi strategis, karena tidak semua DMI Ranting desa lain masuk dalam struktur organisasi pemerintah desa seperti Panggungharjo ini. Artinya, DMI Ranting Panggungharjo memiliki pos anggaran untuk mendukung eksistensi Panggungharjo sebagai desa antikorupsi. secara terperinci, potensi DMI Ranting Panggungharjo adalah: Memiliki paguyuban mubaligh/ dai antikorupsi; Memiliki dukungan dana yang bersumber dari dana desa; Memiliki pengetahuan di bidang pencegahan korupsi perspektif agama (Fikih Antikorupsi); dan Memiliki masjid yang tersebar di seluruh desa Panggungharjo sebanyak 14 masjid sebagai media dakwah antikorupsi.

### Permasalahan mitra

Meskipun DMI Ranting Panggungharjo menempati posisi yang strategis dengan potensi yang memadai, namun mitra sasaran ini juga masih memiliki banyak permasalahan. Berdasarkan analisis situasi terkini sebagaimana ditunjukkan gambar 2, permasalahan prioritas mitra adalah: (1) Personalia DMI Ranting Panggungharjo mengalami krisis integritas, di mana mereka ragu terhadap dirinya sendiri, apakah pantas dakwah antikorupsi, mengingat dirinya belum bisa membuktikan dirinya antikorupsi.

Argumennya, pimpinan KPK saja bisa terkena kasus korupsi, bahkan menteri agama juga ada yang kena kasus korupsi, apalagi hanya seorang Dai; (2) Kajian fikih antikorupsi belum menjadi mainstreaming di DMI Ranting Panggungharjo. Padahal, kitab-kitab Fikih Antikorupsi sudah banyak bermunculan (Alim, 2017; Muhammadiyah, 2006). Bahkan, selama ini tidak pernah ada penguatan fikih antikorupsi secara khusus di internal DMI Ranting Panggungharjo; dan (3) DMI Ranting Panggungharjo belum memiliki media dakwah antikorupsi berbasis teknologi informasi. Padahal, dalam website resmi pemerintah desa Panggungharjo, sudah disediakan fitur khusus tentang dakwah antikorupsi.



Gambr 2. Ketua Tim Pengabdi dan mahasiswa Wawancara mitra analisis situasi terkini

Secara geografis, letak desa Panggungharjo sebelah utara berbatasan dengan kota Yogyakarta, sebelah timur berbatasan dengan desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon; sebelah selatan berbatasan dengan desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon; dan sebelah barat berbatasan dengan desa Pendowoharjo, kecamatan Sewon. Sebagai desa yang berdekatan dengan kota Yogyakarta, Panggungharjo menjadi kawasan aglomerasi perkotaan yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan fungsi lahan jenis sawah menjadi pemukiman dan kegiatan bisnis dengan laju pertumbuhan 2% per tahun. Akan tetapi, ditinjau dari perspektif pertanian, tingginya perubahan alih fungsi lahan sawah menjadi tanah kering hingga pemukiman perlu dikendalikan agar luasan lahan pertanian masih mampu mencukupi ketersediaan pangan masyarakat Panggungharjo.

#### Kondisi terkini mitra sasaran

Profil mitra sasaran DMI Ranting Panggungharjo terdiri dari Pembina, majelis dan pakar terdiri dari 4 orang, salah satunya Lurah Panggungharjo. Pengurus harian terdiri dari: Ketua didampingi wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Empat departemen, yakni Departemen Pemberdayaan dan Pengembangan SDM. Departemen Dakwah dan Pengkajian, Departemen Sarana, Hukum, dan Wakaf; serta Departemen Potensi Muslimah dan Anak.

Kondisi mitra sasaran saat ini, ketika Ketua Tim Pengabdi wawancara mendalam di kantor desa Panggungharjo, menyatakan tiga kondisi terkini mitra, yaitu: a) kami menjadi anak emas pemerintah desa karena diharapkan berkontribusi bagi pembangunan desa antikorupsi Panggungharjo yang lebih berkelanjutan; b) kami masih ragu (untuk tidak mengatakan pesimis), bahwa dakwah antikorupsi berdampak signifikan bagi desa; c) sebagian besar kami generasi “kolonial” yang kurang ramah terhadap kemajuan teknologi informasi termasuk dakwah digital.

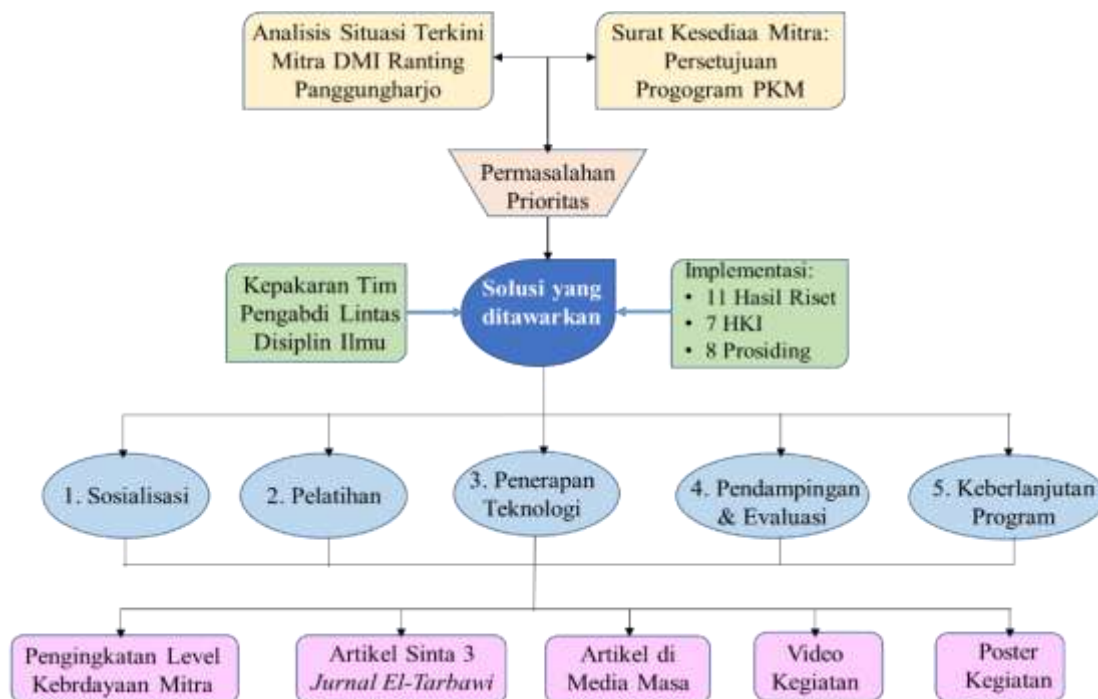
#### Tujuan PkM

Tujuan PkM ini adalah memberi solusi atas persoalan prioritas mitra, yakni kurangnya partisipasi aktif dalam pengembangan desa antikorupsi. Tujuan ini diwujudkan dalam penguatan integritas dengan pelatihan dai antikorupsi. Dalam jangka panjang, setiap masjid di kalurahan Panggungharjo memiliki agenda rutin dan berkelanjutan tentang dakwah antikorupsi secara terus menerus, sehingga berdampak luas bagi penguatan integritas religius warga

## METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan PKM menggunakan *participatory action research* (Jacques M. Chevalier, 2019), dimulai dari analisis situasi terkini atau kondisi eksisting kelompok mitra sasaran yang telah dilakukan pada 5 dan 6 April 2025 bertempat di balai desa Panggungharjo ditemui oleh Sekretaris desa dan Ketua DMI Ranting Panggungharjo. Hasil analisis menemukan banyak permasalahan, namun permasalahan prioritas mitra yang disepakati hanya dua yakni kompetensi dai dan keterampilan teknologi untuk dakwah.

Pada tahap selanjutnya, akan dilakukan 5 langkah PKM secara lengkap, yakni: (1) sosialisasi, (2) pelatihan, (3) implementasi, (4) pendampingan, dan (5) keberlanjutan. Dalam hal ini DMI ranting Panggungharjo juga menyatakan kesediannya untuk terlibat aktif dengan segala potensi dan sumberdaya yang ada. Seluruh tahapan ini guna menghasilkan luaran PKM, yakni tingkat keberdayaan mitra, publikasi artikel pada jurnal sinta 3, artikel di media masa, video dan poster kegiatan. Gambar 3 merupakan bagan alir tahapan pelaksanaan PKM ini secara lengkap.



Gambar 3. Bagan alir tahapan pelaksanaan PKM

### Tahap atau langkah-langkah

Tahapan atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan prioritas mitra adalah sebagai berikut:

#### a. Sosialisasi

Tahapan awal berupa sosialisasi program kepada mitra, yaitu Paguyuban Mubaligh Desa Panggungharjo, tokoh masyarakat, dan pengurus masjid. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya dakwah antikorupsi, peran strategis dai dalam membentuk budaya integritas, serta memperkenalkan teknologi yang akan digunakan, yakni *Neuro-Anticorruption/NeuroSky* antikorupsi sebagai alat bantu pemetaan potensi perilaku koruptif berbasis gelombang otak (Suyadi, 2023). Sosialisasi juga mencakup penguatan komitmen kolektif dalam mewujudkan masjid sebagai pusat edukasi antikorupsi.



#### b. Pelatihan

Dai dan mubaligh akan mengikuti pelatihan intensif terkait materi dakwah antikorupsi, pendekatan agama dalam pencegahan korupsi, teknik komunikasi publik, serta pengenalan dan penggunaan perangkat teknologi *Neuro-Anticorruption*/ NeuroSky antikorupsi (S00202210030, 2022). Pelatihan ini akan dilengkapi dengan modul dan media presentasi yang kontekstual dengan kondisi masyarakat desa. Peserta juga akan dilatih menggunakan media digital dan strategi dakwah berbasis data untuk meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Tahapan-tahapan konkrit dan lengkap untuk mengatasi permasalahan.

Tabel 1. Metode Pelaksanaan PkM

Aspek PkM	Keterangan	
Waktu dan tempat kegiatan	:	Pendopo Kampung Mataraman Desa Panggungharjo
Oyek/ sasaran/ mitra	:	Dewan Masjid Indonesia Ranting Panggungharjo
Jumlah anggota terlibat	:	35
Metode pelaksanaan	Waktu pelaksanaan	Bentuk kegiatan
1. Sosialisasi	: 5 Juli 2025	Small Group Discussion
2. Pelatihan	: 20 Agustus 2025	Pelatihan
3. Pendampingan	: 30 Agustus 2025	Workshop
4. Evaluasi dan keberlanjutan	: 7 September 2025	Focus Group Discussion

#### c. Penerapan Teknologi

Setelah pelatihan, peserta akan mulai menerapkan *Neuro-Anticorruption*/ NeuroSky antikorupsi dalam aktivitas dakwah dan edukasi masyarakat. Alat ini digunakan sebagai inovasi untuk mengenali respons mental dan gelombang otak terkait kejujuran dan integritas dalam simulasi atau pelatihan. Teknologi ini juga menjadi daya tarik edukatif dalam kampanye antikorupsi berbasis masjid, serta mendorong masyarakat memahami pentingnya kesadaran diri dan kontrol moral dalam mencegah perilaku koruptif.

#### d. Pendampingan dan Evaluasi

Tim pengabdian akan melakukan pendampingan lapangan secara berkala untuk memastikan efektivitas penggunaan teknologi, mengamati perkembangan kompetensi dai, serta mengevaluasi penerimaan masyarakat terhadap dakwah antikorupsi. Evaluasi dilakukan melalui observasi, wawancara, dan umpan balik dari peserta kegiatan (Chevalier, 2019). Hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan metode dan materi dakwah ke depan.

#### e. Keberlanjutan Program

Untuk menjaga keberlanjutan program, akan dibentuk tim lokal penggerak dakwah antikorupsi yang terdiri dari dai muda, pengurus masjid, dan pemuda desa. Teknologi *Neuro-Anticorruption* atau NeuroSky dan media edukasi akan diserahkan secara resmi kepada mitra melalui BAST, lengkap dengan pelabelan sumber dana. Modul dan materi pelatihan akan disusun dalam bentuk digital agar bisa digunakan berulang. Selain itu, akan dibangun jejaring komunikasi antar dai agar program terus berjalan secara mandiri dan meluas ke desa sekitar (Suyadi et al., 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan prioritas mitra, solusi yang ditawarkan dan metode yang diterapkan pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini disajikan dalam tiga temuan pokok. pertama, sosialisasi dan koordinasi dengan DMI ranting Panggungharjo. Kedua, hasil pelaksanaan pelatihan dai antikorupsi, termasuk pendampingan dan penyuluhan. Ketiga, tingkat keberdayaan mitra. Berikut ini dikemukakan secara lengkap hasil pelaksanaan PkM ini.

### Sosialisasi pelatihan Dai Antikorupsi.

Sosialisasi program kegiatan PkM dilaksanakan pada 5 Juli 2025 di kantor sekretariat DMI Ranting Panggungharjo yang terletak di kompleks kantor kalurahan Panggungharjo. Sosialisasi ini dihadiri oleh Lurah Panggungharjo, Ketua dan Sekretaris DMI ranting Panggungharjo, dan perwakilan takmir masjid se kalurahan Panggungharjo. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai penyuluh atau narasumber sosialisasi adalah ketua Tim Pengabdian sendiri didampingi oleh mahasiswa. Setelah sosialisasi selesai dilanjutkan dengan koordinasi pelaksanaan PkM yang disepakati pada tanggal 30 Agustus 2025. Gambar 4 merupakan situasi dan kondisi sosialisasi dan koordinasi program PkM tersebut.



Gambar 4. Sosialisasi dan Koordinasi PKM

Dalam kegiatan sosialisasi dan koordinasi tersebut, lurah Panggungharjo menyambut dengan sangat antusias, karena merasa program ini sangat sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Ia juga mengakui bahwa selama ini Panggungharjo dengan Institusi Tim Pengabdian sudah lama bekerjasama, khususnya sebagai tempat KKN. Dalam hal ini, lurah Panggungharjo menyatakan:

“Kelurahan Panggungharjo ini kan desa antikorupsi pertama di Indonesia, sejak 2019. Hingga saat ini belum ada inovasi? oleh karena itu, kita sangat menyambut kedatangan tim pengabdian dari UAD untuk mendorong desa antikorupsi Panggungharjo lebih maju lagi” (Lurah Panggungharjo).

Di samping itu, ketua DMI Ranting Panggungharjo juga menyambut dengan antusias program PkM. Mereka juga mengaku bahwa selama ini belum ada pelatihan khusus tentang dai antikorupsi. Kehadiran tim pengabdian, menjadi angin segar bagi DMI untuk berkontribusi dalam pengembangan desa antikorupsi. Ketua DMI ranting Panggungharjo menyatakan:

“Selama ini belum ada pelatihan dai antikorupsi. Memang sebelumnya pernah ada pelatihan bagi DMI Panggungharjo, namun bukan tentang antikorupsi. Oleh karena itu, pelatihan ini merupakan hal baru bagi kami. Bahkan kami minta agar pelatihan ini bisa diikuti oleh seluruh takmir masjid se-kalurahan Panggungharjo yang jumlahnya 35 masjid.” (Ketua DMI Ranting Panggungharjo).

Materi sosialisasi dakwah antikorupsi tersebut diambil dari riset-riset tim pengabdian sendiri yang diperkaya dengan riset lainnya yang relevan. Beberapa di antaranya adalah urgensi pendidikan antikorupsi (Suyadi et al., 2021), pendidikan antikorupsi di masyarakat rumah dan sekolah (Sumaryati & Suyadi, 2019), rencana aksi pendidikan antikorupsi dan lain-lain (Sumaryati et al., 2022). Oleh karena itu, PkM ini merupakan bagian penting dari hilirisasi hasil-hasil riset, sehingga mudah diterima oleh mitra sasaran dengan sangat baik. Penerimaan ini tidak terlepas dari kesesuaian program PkM dengan RPJMD Panggungharjo. Di samping itu, secara spesifik, kompetensi Tim Pengabdian sebagai pakar

antikorupsi, khususnya fikih antikorupsi sesuai dengan mitra sasaran, yakni DMI Ranting Panggungharjo.

#### Pelatihan dan pendampingan teknologi dakwah antikorupsi

Berdasarkan koordinasi dan sosialisasi, disepakati bahwa pelaksanaan pelatihan dai antikorupsi dilaksanakan pada 30 Agustus 2025 bertempat di Pendopo Kidul Kampung Mataraman Kelurahan Panggungharjo. Kampung mataraman ini merupakan salah satu badan usaha miliki desa yang sudah lebih dari 5 tahun beroperasi dan terus mengalami peningkatan. Bertindak sebagai narasumber adalah Tim Pengabdian sendiri, yakni Suyadi, Suyitno dan Fandi Akhmad. Gambar 5 merupakan dokumentasi pelaksanaan PKM ini.



Gambar 5. Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan PKM sebagaimana ditunjukkan gambar 5 diikuti oleh peserta sebanyak 31 dari 35 yang diundang, berasal dari masjid seluruh Panggungharo sebagaimana permintaan ketua DMI Ranting Panggungharjo. Dalam paparannya, Suyadi sebagai narasumber pelatihan menyatakan bahwa:

“Dalam agama Islam, terdapat larangan korupsi yang diungkapkan dengan istilah yang beragam, seperti: *batil* (ketidak adilan), *ghulul* (penggelapan/ korupsi), *riswah* (suap), *ghasbah* (kecurangan), *khiyanat* (penyalahgunaan wewenang), *maksu* (pungutan liar), *ikhtilas* (pencopetan), *intihab* (perampasan), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan)” (Suyadi, Materi pelatihan dai antikorupsi).

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّائِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَكُلِهِمُ السُّحْتُ لَبِئْسَ مَا  
كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

*“Mengapa para ulama dan pendeta tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan (makanan) yang haram? sungguh, itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka perbuat” (QS. Al-Maidah [5]: 63).*

*Asbabun nuzul* turunnya ayat di atas adalah keberadaan orang-orang Yahudi yang berbuat buruk dan memakan yang haram namun tidak pernah mendapat peringatan dari Pendeta mereka (Anwar, 2006). Karena itu muncul pertanyaan mengapa para Pendeta Yahudi dan para agamawan mereka, setelah mengetahui perilaku masyarakat tersebut, tidak melarang mereka yang sering mengucapkan perkataan bohong dan terbiasa memakan yang haram? Bila terus dibiarkan, sungguh, hal itu



merupakan kebiasaan yang sangat buruk dan apa yang mereka perbuat merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah.

Dalam paparannya tersebut, Suyadi juga menjelaskan tentang kemajuan teknologi antikorupsi yang sedang dikembangkan, yakni detektor gelombang otak perilaku koruptif. Ia menyatakan:

“Kami saat ini sedang mengembangkan teknologi deteksi dini gelombang otak perilaku koruptif. Meskipun masih dalam pengembangan, namun prototipe ini sudah jadi. Alat ini dapat digunakan oleh setiap institusi untuk melakukan seleksi integritas calon pimpinan.” (Suyadi, narasumber Pelatihan dai antikorupsi).

Selanjutnya, Suyitno melanjutkan paparan Suyadi tersebut di atas dengan menekankan urgensi desa antikorupsi. Pada prinsipnya, untuk menjadi dai antikorupsi, tidak perlu membuktikan diri bahwa kita antikorup dengan cara harus menjadi pejabat dulu, kemudian terbukti bersih, baru menyeru pada pencegahan korupsi.

“Oleh karena itu, kampanye antikorupsi dapat dilakukan siapa saja selama kita semua berkomitmen pada nilai-nilai integritas, yakni: Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras.” (Suyitno, materi pelatihan dai antikorupsi).

Materi-materi pelatihan tersebut pada dasarnya diambilkan dari sari pati hasil-hasil riset tim pengabdian sendiri yang diperkaya dengan riset-riset lain yang relevan. Beberapa di antaranya adalah profil dai antikorupsi (Suyadi, Asmorojati, et al., 2021), profil pendidikan antikorupsi (Suyadi, 2020b), insersi pendidikan antikorupsi dalam Islam berbasis neurosains (Suyadi, Dwi Hastuti, 2019; Suyadi, 2019), dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PkM ini merupakan pengabdian berbasis riset.

Setelah paparan materi selesai, para peserta yang berasal dari 35 masjid di seluruh Panggungharjo merespons materi yang disampaikan. Respons peserta cukup beragam, ada yang sangat mendukung, ada yang masih ragu-ragu dan bahkan masih ada memandang kurang penting. Berikut ini adalah tiga kutipan pertanyaan dari peserta pelatihan dai antikorupsi:

“Sekarang ini kan eranya digitalisasi, sehingga kasus-kasus korupsi selalau mewarnai media sosial dan elektronik bahkan termasuk tayangan negatif lainnya. Apakah kasus-kasus korupsi memang hanya terjadi sekarang ini atau baru sekarang ini terbuka sedangkan korupsi juga sudah terjadi sejak lama?” (TA 53 Tahun, Takmir Masjid di lingkungan Kalurahan Panggungharjo).

“Kami baru menyadari posisi strategis takmir masjid sebagai juru kampanye antikorupsi. Sebagai tindak lanjut dan keberlangsungan pelatihan ini, insyaAllah kami akan mengagendakan khotbah Jumat di masjid kami bertemakan fikih antikorupsi.” (57 Tahun, Takmir Masjid di lingkungan Kalurahan Panggungharjo).”

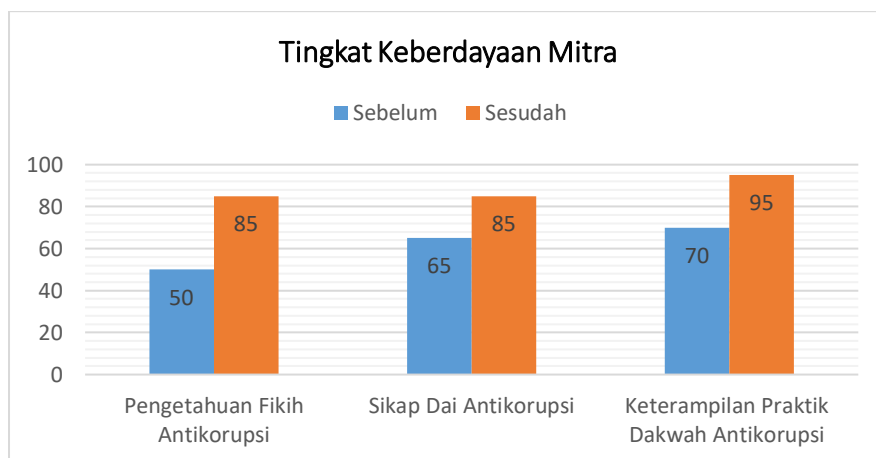
“Ada kemungkinan para pejabat negara, seperti mantan menteri agama, mereka korupsi bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang lain. Jadi sebenarnya yang bersangkutan tidak melakukan, melainkan bawahannya. Namun, di mata hukum yang disalahkan adalah pemimpinnya, sehingga wajar menteri agama sekalipun tidak luput dari kasus ini” (AH, 42 Tahun, Takmir Masjid di lingkungan Kalurahan Panggungharjo).

Para narasumber merespons pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para peserta, salah satunya adalah seruan atau ajakan untuk dakwah antikorupsi dai masjid masing-masing, sebagai interpretasi teologi antikorupsi (Wijaya, 2014). Tim PkM berharap, minimal satu kali setiap bulan semua masjid di Kelurahan Panggungharjo mengusung tema dakwah antikorupsi sebagai salah satu bentuk sustainable gerakan (Lombardi, Cano-Rubio, Trequattrini, & Fuentes-Lombardo, 2020). Secara berkala dan

berkesinambungan tim pengabdian juga akan mendampingi para peserta menyusun teks naskah khotbah jumat dan dibacakan secara berkala.

### Tingkat Keberdayaan Mitra DMI Ranting Panggungharjo

Untuk mengukur tingkat keberdayaan mitra, Tim Pengabdian melakukan pengukuran peningkatan kompetensi melalui pre test sebelum pelaksanaan program PkM dan post test setelah pelaksanaan PkM dengan teknik observasi (Denzin, 1997). Mengacu pada metode penelitian (Sugiyono, 2015), khususnya instrumen yang digunakan terkait indikator kompetensi antikorupsi menggunakan tiga indikator, yakni pengetahuan tentang fikih antikorupsi, sikap dai antikorupsi, dan keterampilan dakwah antikorupsi (Suyadi, 2025). Grafik 1 merupakan hasil pengukuran tersebut.



Grafik 1. Peningkatan tingkat keberdayaan mitra

Grafik 1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kompetensi dai antikorupsi secara signifikan, dilihat dari pengetahuan, sikap dan keterampilan. Pada aspek pengetahuan, dai antikorupsi memiliki referensi yang lebih memadai tentang dalil-dalil nas atau ayat-ayat Al-Qur'an tentang antikorupsi dari 50% menjadi 85%. Pada aspek sikap, para dai antikorupsi mengalami ketegasan yang lebih kuat, dimana korupsi yang semula dipandang urusan pelanggaran hukum duniawi semata, ternyata juga pelanggaran agama, sehingga dari penguatan sikap meningkat dari 65% menjadi 85%. Adapun dari keterampilan dakwah antikorupsi, juga mengalami peningkatan paling signifikan, yakni dari 70% menjadi 95%. Peningkatan tingkat keberdayaan mitra ini melebihi dari program-program PkM sebelumnya, seperti pelatihan dai antikorupsi di masa transisi (Suyadi et al., 2021) dan pelatihan dai antikorupsi di Prenggan pada tahun 2022 (Suyadi et al., 2022). Hal ini menunjukkan dakwah antikorupsi merupakan pola baru yang akan dibiasakan secara berkelanjutan. Dengan demikian program PkM ini memiliki kontribusi nyata secara signifikan bagi mitra sasaran DMI ranting Panggungharjo dalam berkontribusi mengembangkan desa antikorupsi.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan permasalahan prioritas mitra DMI Ranting Panggungharjo dan solusi inovatif yang diterapkan, ternyata mitra program dai antikorupsi menjadi warna tersendiri bagi pengembangan Kalurahan Panggungharjo sebagai desa antikorupsi. Keberhasilan PkM ini dalam meningkatkan aspek pengetahuan tentang fikih antikorupsi, sikap integritas, dan keterampilan dakwah antikorupsi menjadi kekuatan tersendiri bagi Kalurahan Panggungharjo sebagai desa antikorupsi. Agenda dakwah antikorupsi secara kontinu dan berkelanjutan akan menjadi corak tersendiri bagi desa antikorupsi Panggungharjo. Sebagai saran, dai antikorupsi yang dikembangkan

oleh DMI ranting Panggungharjo dapat direplikasi atau diadopsi oleh 40 desa antikorupsi lain di seluruh Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi yang telah mendanai pengabdian masyarakat ini berdasarkan Nomor SP DIPA-139.04.1.693320/2025 revisi ke 04 tanggal 30 April 2025 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Nomor: 010/PkM/LPPM.UAD/VI/2025.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. W. H. (2017). *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. Jakarta (ID): Lakpesdam-PBNU.
- Anwar, S. (2006). *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Jakarta (ID): Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Edi, P. (2021, November). KPK Tetapkan Panggungharjo Jadi Desa Antikorupsi Pertama di Indonesia. *Merdeka.Com*, p. 1.
- Ismanto. (2021). *Studi Perbandingan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia*. Universitas Jambi. Universitas Jambi.
- Jacques, M., & Chevalier, D. J. B. (2019). *Participatory Action Research: Theory and Methods for Engaged Inquiry*. New York: Routledge.
- Korupsi, K. P. (2021). *Buku Panduan Desa Antikorupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lombardi, R., Cano-Rubio, M., Trequattrini, R., & Fuentes-Lombardo, G. (2020). Exploratory evidence on anticorruption activities in the Spanish context: A sustainable governance approach. *Journal of Cleaner Production*, 249, 119424. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119424>
- Muhammadiyah, M. T. (2006). *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Jakarta (ID): Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Norman, K., & Denzin, Y. S. L. (1997). *Handbook of Qualitative Research* (2nd ed.). India: Sage Publication. Pvt. Ltd.
- Panggungharjo, L. D. (2019). *Peraturan Desa (Perdes) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024*. Yogyakarta (ID): Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta. Retrieved from <https://www.belbuk.com/metode-penelitian-pendidikan-pendekatan-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-p-10743.html>
- Sumaryati., Suyadi, Z., & Nuryana, A. A. (2022). Anti-corruption Action : A Education Model During COVID-19. *Frontiers in Education*, 7(June), 1–10. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.907725>
- Sumaryati., & Suyadi, D. H. (2019). *Pendidikan Antikorupsi dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*. Yogyakarta (ID): UAD Press.
- Suyadi., Asmorajari, A. W., & Mohamamd, J. I. (2021). Pelatihan Dai Antikorupsi di Era Transisi Pilihan Lurah: Program Pembedayaan Masyarakat Selama Pandemi COVID-19 di Banguncipto Kulon Progo. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan* (Vol. 2, pp. 623–629). Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan. Retrieved from <http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/2306>
- Suyadi., & Dwi, H. S. (2019). Anticorruption Education Insertion in Islamic Religious Learning In The Umar Mas'ud Kindergarten of Bawean Island Indonesia. *International Journal for Innovation Education and Research*, 7(10), 771–783.
- Suyadi. (2020a). *Profil Dai Antikorupsi*. Yogyakarta (ID): UAD Press.
- Suyadi. (2020b). *Profil Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta (ID): UAD Press.
- Suyadi. (2022). *S00202210030*. Indonesia.
- Suyadi. (2023). Detektor Gelombang Otak Pencegahan Korupsi, Nomor Paten IDS000007060.



Indonesia.

- Suyadi. (2025). Driving school program to strengthening anti-corruption education within the integrity zone policy. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 14(4), 2722–2731. <https://doi.org/10.11591/ijere.v14i4.28773>
- Suyadi., Asmorojati, A. W., Jailani, M., & Ismunandar. (2021). Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. In *Pelatihan dai Antikorupsi di Era Transisi Pilihan Lurah: Program Pemberdayaan Masyarakat Selama Pandemi Covid-19 di Banguncipto Kulon Progo* (Vol. 2, pp. 623–629).
- Suyadi., Nuryana, Z., & Asmorojati, A. W. (2021). The insertion of anti-corruption education into Islamic education learning based on neuroscience. *International Journal of Evaluation and Research in Education*. <https://doi.org/10.11591/IJERE.V10I4.21881>
- Suyadi, S. (2019). Integration of Anti-Corruption Education (PAK) In Islamic Religious Education (PAI) With Neuroscience Approach (Multi-Case Study in Brain Friendly PAUD: I Sleman Kindergarten Yogyakarta). *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(2), 307–330. <https://doi.org/10.18326/INFSL3.V12I2.307-330>
- Suyadi, S., Waharjani, W., Sumaryati, S., Sukmayadi, T., & Siraj, S. B. (2022). Mosque-based anti-corruption village: Community empowerment program in Prenggan, Kemantren Kotagede Yogyakarta. *Community Empowerment*, 7(8), 1344–1355. <https://doi.org/10.31603/ce.7579>
- Wijaya, Y. (2014). Constructing an Anti-Corruption Theology. *Exchange*, 43(1), 221–236. <https://doi.org/10.1163/1572543X-12341325>